

Katalog : 4102004.1407

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ROKAN HULU**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016

ISBN : 978-602-5462-20-7

No. Publikasi : 14070.1724

Katalog : 4102004.1407

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 60 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu 2016 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu antar waktu. Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pasir Pengaraian, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Rokan Hulu

Hari Prasetyo, SST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Singkatan dan Akronim.....	xi
1. Kependudukan.....	3
2. Kesehatan dan Gizi.....	17
3. Pendidikan.....	25
4. Ketenagakerjaan.....	37
5. Taraf dan Pola Konsumsi.....	45
6. Perumahan dan Lingkungan.....	51
Istilah Teknis.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012 – 2016.....	5
1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016.....	8
1.3 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015- 2016.....	10
1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara KB di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015-2016.....	12
KESEHATAN DAN GIZI	
2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi menurut Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 - 2015.....	19
2.2 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	20
2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	21
PENDIDIKAN	
3.1 Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.....	28
3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	31
3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	32
3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	33
KETENAGAKERJAAN	
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 – 2015.....	39
4.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 – 2015.....	40

4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 – 2015.....	42
---	----

TARAF DAN POLAKONSUMSI

5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	46
5.2 Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016.....	47
5.3 Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016.....	48

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	53
6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m2) di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016.....	54
6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016.....	56
6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012-2016.....	5
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012-2016.....	8
Gambar 1.3 Persentase Wanita Yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia 10 Tahun Ke atas di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016...	11
Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	18
Gambar 3.1 Angka Melek Huruf di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015–2016...	27
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012 – 2016.....	29
Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 – 2016.....	47

SINGKATAN DAN AKRONIM

APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU 2016**

Kependudukan

Kesehatan dan Gizi

Pendidikan

Ketenagakerjaan

Taraf dan Pola Konsumsi

Perumahan dan Lingkungan

<https://profilkab.bps.go.id>

I. KEPENDUDUKAN



Penduduk Kabupaten Rokan

Hulu sebesar **616 466**

jiwa pada Tahun 2016



316 506
jiwa



299 960
jiwa

Persentase Wanita kawin umur 15 tahun kebawah 12,58 persen

Angka Beban
Tanggungan
penduduk /
Dependency Ratio
56,67 persen





1 KEPENDUDUKAN

*S*u kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan terus menjadi perhatian pemerintah yaitu jumlah penduduk Indonesia yang besar, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2010-2020 tercatat sebanyak 616.466 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 24.188 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 592.278 jiwa. Bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu saat ini mengalami peningkatan sekitar 17,87 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu telah mengalami penambahan penduduk sebesar 93.442 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 tercatat sebesar 4,08 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012 - 2016

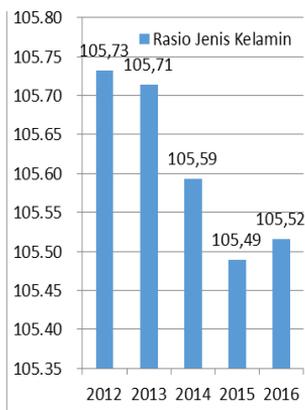
Tahun	Jumlah Penduduk (000) Jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	523 024	3,14	105,73
2013	545 483	4,29	105,71
2014	568 576	4,23	105,59
2015	592 278	4,17	105,49
2016	616 466	4,08	105,52

[Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020]

Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 3,14 persen dan mengalami kenaikan menjadi 4,29 persen pada tahun 2013 dan turun menjadi 4,08 persen pada tahun 2016. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan arah menuju adanya keberhasilan.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, di Kabupaten Rokan Hulu, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebesar 105,52. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Rokan Hulu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Kabupaten Rokan Hulu, sebagian besar hampir sama di kisaran 105 – 106 dan terjadi pada 5 tahun terakhir ini.

Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012-2016



Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi nasional dan juga di Kabupaten Rokan Hulu adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terjadi di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Angka Beban Ketergantungan

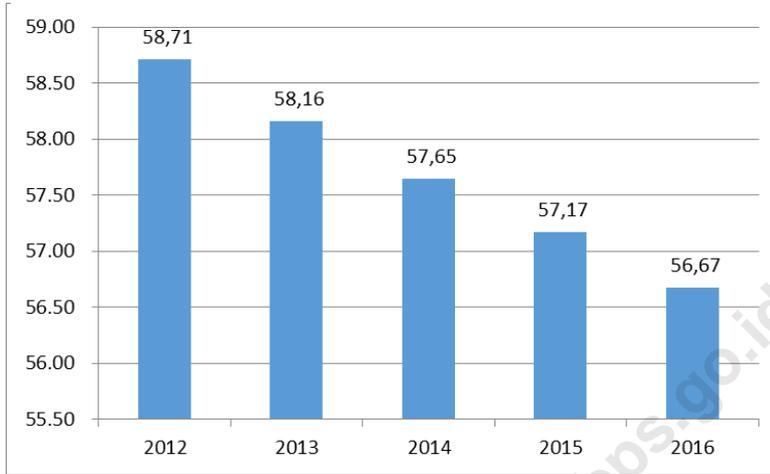
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban

yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2012-2016 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka beban tanggungan di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 57,17 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 57 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2016 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 56,67 persen artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 56-57 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Gambar 1.2. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012-2016



Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2016 terdapat sekitar 33,48 persen penduduk berumur 0-14 tahun.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada sebanyak 33,78 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 33,48 persen pada tahun 2016.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 + tahun	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	33,78	63,62	2,59	57,17
2016	33,48	63,83	2,69	56,67

[Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020]

Pada Tabel 1.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020 mencapai 63,62 persen pada tahun 2015 dan kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 63,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Rokan Hulu menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 2,59 persen pada tahun 2015 menjadi 2,69 persen pada tahun 2016.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Angka fertilitas yang tidak dapat terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang

wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

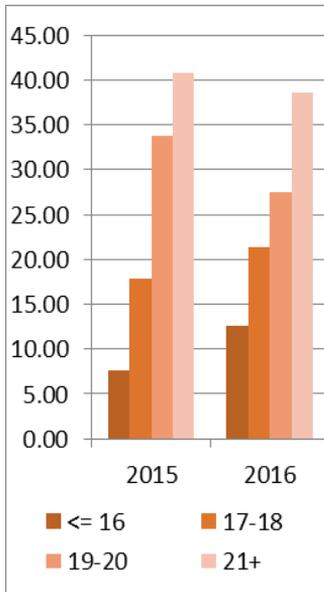
Tabel 1.3 Persentase Wanita 10 + tahun pernah kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Kelompok Umur	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
<= 16	7,63	12,58
17-18	17,90	21,35
19-20	33,72	27,50
21+	40,75	38,57

Sumber: Susenas 2015-2016

Berdasarkan tabel 1.3 usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun. Pada rentang tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar pada kelompok umur 19-20 tahun, dan 21 tahun ke atas mempunyai tingkat fertilitas tertinggi. Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak, karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita sudah sangat baik dan sempurna. Selain itu, tabel

Gambar 1.3
 Persentase Wanita Yang
 Melakukan Perkawinan Pertama
 di Usia 10 Tahun Ke atas di
 Kabupaten Rokan Hulu, Tahun
 2015 - 2016



Masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB menyebabkan perkembangan cakupan ber-KB dianggap masih lambat sehingga berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

tersebut juga menggambarkan bahwa terjadi pergeseran persentase wanita kawin di usia 16 tahun ke bawah dari 7,63 persen pada tahun 2015 menjadi 12,58 persen pada tahun 2016. Secara umum di Kabupaten Rokan Hulu, sebagian besar wanita yang melakukan perkawinan pertamanya berada pada kelompok usia 21+ tahun.

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bias dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 50 persen yaitu masing-masing sebesar 57,81 persen pada tahun 2015 dan 56,26 persen pada tahun 2016.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Alat/ Cara KB yang Digunakan	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/ MOP	1,66	0,20
AKDR/IUD/ spiral	0,76	3,66
Suntikan KB	56,25	57,89
Susuk KB	4,67	6,81
Pil KB	34,63	29,57
Kondom/ karet KB	1,35	0,88
Pantang Berkala/ Kalender	0,55	0,62
Lainnya	0,13	0,37

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2015 penggunaan suntikan mencapai

56,25 persen dan meningkat menjadi 57,89 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penggunaan pil justru mengalami penurunan dari 34,63 persen pada tahun 2015 menjadi 29,57 persen pada tahun 2016.

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, kondom/ karet, pantang berkala/kalender dan metode menyusui alami masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen pada tahun 2016. Jika dilihat pertumbuhannya, alat/cara KB yang mengalami pertumbuhan negative/penurunan adalah penggunaan MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, Pil KB, kondom dan lainnya (tradisional).

II. KESEHATAN DAN GIZI



Angka kesakitan sebesar
23,47 persen



Penduduk yang berobat
jalan ke puskesmas
20,08 persen



84,52% BCG

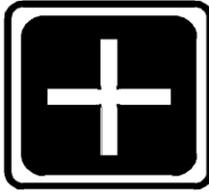
81,08% DPT

85,25% POLIO

73,58% CAMPAK

78,36% HB





2. KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

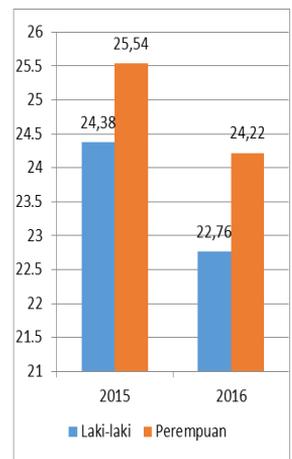
Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan persentase penduduk di Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah 23,47 persen atau menurun 1,48 persen dibanding Tahun 2015. Selama Tahun 2015 dan 2016, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Hasil Susenas tahun 2015 dan 2016 rata-rata lama sakit penduduk paling banyak berada pada kisaran 4-7 hari. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.

Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016



Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi menurut Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 - 2015

Jumlah Hari Sakit	2014	2015
(1)	(2)	(3)
≤ 3	60,94	38,56
4-7	21,94	40,36
8-14	6,56	8,81
15-21	1,89	4,41
22-30	8,67	7,86

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.2. Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Jenis	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
BCG	84,06	84,52
DPT	74,73	81,08
Polio	82,72	85,25
Campak/Morbili	68,42	73,58
Hepatitis B	76,59	78,36

[Diolah dari Hasil Susenas]

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2015 dan 2016, mayoritas anak umur 12-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 70 persen. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan persentase di semua jenis imunisasi.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk. Sepanjang Tahun 2015-2016, fasilitas kesehatan yang relatif lebih banyak dimanfaatkan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu untuk berobat jalan adalah praktek dokter/bidan sekitar 47,33 persen. Fasilitas kesehatan yang lebih banyak dimanfaatkan selanjutnya yaitu puskesmas/pustu. Terjadi penurunan tempat berobat jalan di RS Pemerintah dan RS Swasta di Tahun 2016 dan kenaikan pada Puskesmas/Pustu. Hal ini bisa terjadi karena semakin baiknya pelayanan yang diberikan di puskesmas/pustu dan tanpa ada biaya berobat. Pada Tahun 2016, penggunaan fasilitas kesehatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang terdiri atas

Poskesdes, Polindes, Posyandu dan Balai Kesehatan meningkat dari 0,18 persen pada taun 2015 menjadi 3,85 pesen di tahun 2016. Penduduk yang berobat jalan ke Puskesmas/pustu juga meningkat dari 18,99 persen pada tahun 2015, menjadi 20,08 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk yang berobat ke dukun bersalin dan lainnya dan pengobatan tradisional juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,70 persen pada tahun 2015 menjadi 10,64 persen pada tahun 2016.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Namun peningkatan persentase penduduk yang berobat ke Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif juga menunjukkan masih banyaknya penduduk yang mempercayai pengobatannya ke pengobatan tradisional/alternatif.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Tempat Berobat	2015	2016
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	9,07	4,95
RS Swasta	14,82	12,81
Praktek Dokter/Bidan	46,77	47,33
Klinik/Praktek Dokter Bersama	13,72	10,42
Puskesmas/Pustu	18,99	20,08
UKBM*	0,18	3,85
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif/Lainnya	3,7	10,64

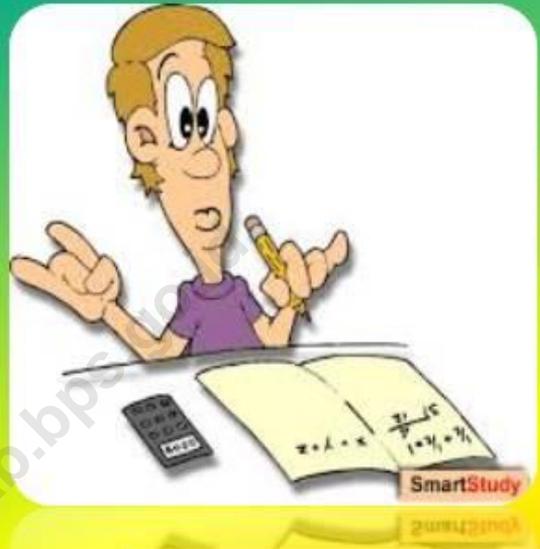
[Diolah dari Hasil Susenas]

Keterangan:

1. Penduduk yang berobat jalan bisa terhitung lebih di satu tempat berobat (Kuesioner VSEN15-K) sehingga persentase di tempat berobat bisa lebih dari 100 persen
2. UKBM* terdiri dari Poseksdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

III. PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf 98,91 persen



Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas 7,97 tahun

APS penduduk berumur 7-12 tahun 98,93 persen





3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah

yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

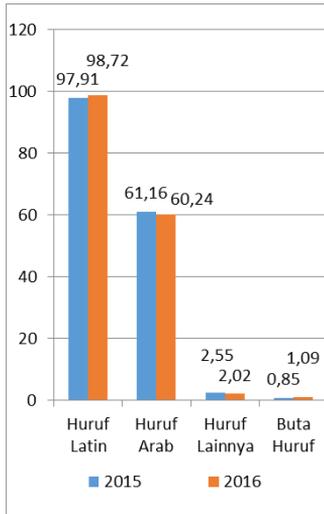
Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada dilingkungannya.

Gambar 3.1
 Angka Melek Huruf di
 Kabupaten Rokan Hulu, Tahun
 2015-2016



Di Kabupaten Rokan Hulu, penduduk yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) sebesar 98,91 persen. Angka melek huruf ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan data tahun 2015 yaitu sebesar 99,15 persen. Jika dilihat dari kemampuan membaca dan menulis huruf latin maka terjadi kenaikan persentase dari 97,91 persen pada tahun 2015 menjadi 98,72 persen pada tahun 2016. Namun, terjadi penurunan dalam kemampuan membaca dan menulis baik huruf arab maupun huruf lainnya. Pada tahun 2016, kemampuan membaca dan menulis huruf arab sebesar 60,24 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,16 persen. Begitu juga dengan kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya.

Walaupun program pemberantasan buta aksara telah menunjukkan adanya keberhasilan, program ini harus terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

Jika dibandingkan AMH penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka AMH penduduk laki-laki pada tahun tahun 2016 sebesar 99,52 persen lebih besar jika dibandingkan AMH penduduk perempuan sebesar 98,28 persen.

Tabel 3.1. Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016

Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis	2016
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	Huruf Latin	99,42
	Huruf Arab	60,49
	Huruf Lainnya	2,31
	Buta Huruf	0,48
Perempuan	Huruf Latin	97,99
	Huruf Arab	59,97
	Huruf Lainnya	1,72
	Buta Huruf	1,73
L + P	Huruf Latin	98,72
	Huruf Arab	60,24
	Huruf Lainnya	2,02
	Buta Huruf	1,09

[Diolah dari Hasil Susenas]

Rata-Rata Lama Sekolah

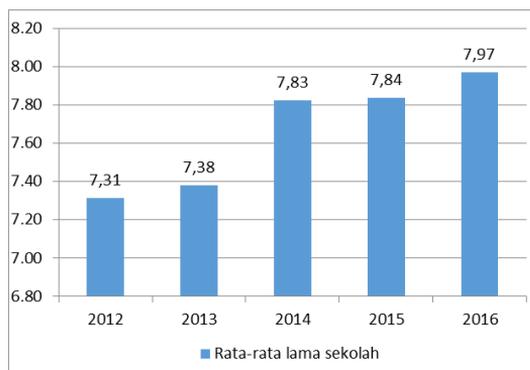
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah semakin tinggi angka IPM yang mencerminkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan fasilitas pendidikan dan akses jalan hingga ke pelosok daerah agar menghindari anak putus sekolah. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan sekolah gratis, beasiswa bagi siswa miskin serta penyeteraan ijazah bagi mereka yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Rokan Hulu yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebesar 7,97 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,84 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Rokan Hulu baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah dikelas 2 SMP.

Gambar 3.2 . Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2012 - 2016



Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi.

Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2016, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas tahun 2016 mencapai 50,65 persen, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 44,82 persen. Peningkatan persentase penduduk yang tamat SMP ke atas disebabkan oleh meningkatnya penduduk 15 ke atas yang memiliki ijazah SD (dari 31,27 persen menjadi 35,20 persen), serta menurunnya persentase penduduk tidak memiliki ijazah (dari 23,91 persen menjadi 14,14 persen).

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	23,91	14,14
SD/MI	31,27	35,21
SMP/MTS	22,75	19,99
SMA/MA	15,36	21,88
SMK/MAK	2,08	2,74
Diploma/DIV/S1/S2/S3	4,63	6,04
Jumlah	100,00	100,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

Pada jenjang pendidikan dasar terjadi penurunan persentase penduduk yang menamatkan SMP. Pada tahun 2015 persentase penduduk yang menamatkan SMP sebesar 22,75 persen, sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 19,99 persen. Pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 15,36 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 21,88 persen pada tahun 2016. Hal serupa juga terjadi pada tingkat pendidikan SMK/MAK yang mengalami peningkatan dari 2,08 pada tahun 2015 menjadi 2,74 pada tahun 2016. Selanjutnya pada jenjang perguruan tinggi (Diploma/DIV/S1/S2/S3) dari 4,63 pada tahun 2015 menjadi 6,04 pada tahun 2016.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar

kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Secara umum APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 98,93 persen pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yang sebesar 98,63 persen. Sedangkan APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 97,64 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 93,88 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur berumur 16-18 tahun mengalami penurunan dari 79,74 persen menjadi 75,02 persen. Peningkatan APS pada kedua kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)¹⁾ Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Kelompok Umur	2015	2016
(1)	(3)	(3)
7-12	98,63	98,93
13-15	93,88	97,64
16-18	79,74	75,02

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan : ¹⁾ Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B dan Paket C)

Secara umum APM SD sebesar 96,57 persen pada tahun 2016 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yang sebesar 96,95 persen. APM SMP juga mengalami penurunan dari 78,42 persen menjadi 77,61 persen. Sama halnya dengan APM SD dan SMP, untuk APM SMA/SMK juga mengalami penurunan dari 65,07 persen menjadi 61,64 persen.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

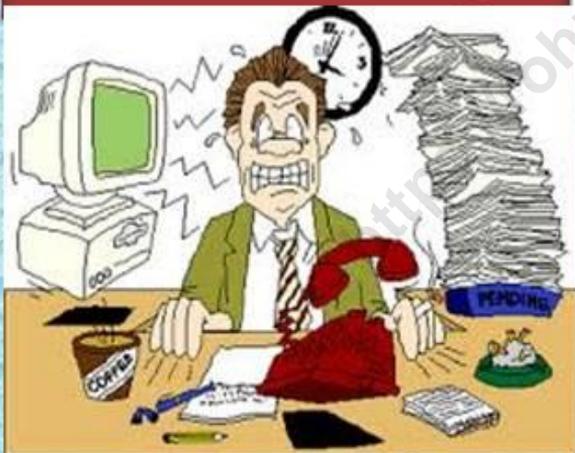
Jenjang Pendidikan	2015	2016
(1)	(3)	(3)
SD	96.95	96,57
SMP	78.42	77,61
SMA	65.07	61,64

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan: ¹⁾ Termasuk Paket A ²⁾ Termasuk Paket B ³⁾ Termasuk Paket C

IV. KETENAGAKERJAAN

Penduduk usia
15 tahun ke
atas yang
termasuk
angkatan kerja
258.412 orang



**TPT 7,82
Persen
tahun 2015,
turun 0,08
persen**



**TPAK
65,41
persen,
naik
2,04
persen**





4 KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, serta persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan. Dalam publikasi ini hanya dapat menampilkan data ketenagakerjaan tahun 2015, sebab data SAKERNAS 2016 tidak tersedia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hulu pada Agustus 2015 mencapai 258.412 orang, bertambah secara absolut sebanyak 19 ribu orang dibanding Agustus 2014 (239.138 orang). Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode yang sama diiringi dengan kenaikan persentase TPAK. Persentase TPAK mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen, dari 63,37 persen (Agustus 2015) menjadi 65,41 persen pada bulan Agustus 2016, yang artinya kenaikan jumlah penduduk yang termasuk angkatan jauh lebih banyak dibandingkan kenaikan penduduk kerja usia kerja (15 tahun ke atas).

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 - 2015

Uraian	2014	2015
(1)	(2)	(3)
TPAK	63,37	65,41
TPT	7,90	7,82

[Diolah dari Hasil Sakemas, Agustus]

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Yaitu sebesar 0,08 persen dari 7,90 persen di tahun 2014 menjadi 7,82 persen di tahun 2015.

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Terjadi pergeseran pola proporsi status pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2014-2015. Berdasarkan status pekerjaan utama, pada tahun 2014, total penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang bekerja di dominasi oleh wiraswasta sebesar 50,36 persen. Sementara itu, pada tahun 2015 terjadi pergeseran, yaitu didominasi oleh buruh/karyawan sebesar 45,57 persen. Pekerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap merupakan persentase pekerja terbesar sepanjang tahun 2015 dan 2016 untuk status pekerjaan berusaha/wiraswasta. Dari pola tersebut menggambarkan bahwa jika pada status pekerjaannya didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, maka usaha yang ada di Kabupaten Rokan Hulu lebih banyak dikuasai oleh pihak asing, dan makin berkurangnya penduduk di Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi pengusaha. Untuk itu perlu dikembangkan usaha ekonomi kreatif, dimana dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga tidak bergantung pada upah/gaji yang sewaktu-waktu bisa dihentikan jika perusahaan tersebut terjadi kebangkrutan.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014 – 2015

Status Pekerjaan Utama	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	30,05	45,57
Berusaha/Wiraswasta	50,36	39,54
Berusaha sendiri	28,31	22,67
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	14,36	10,11
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	7,69	6,76
Pekerja bebas	6,81	6,73
Pekerja Keluarga	12,78	8,16
Jumlah	100,00	100,00

[Diolah dari Data Sakernas]

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan.

Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur. Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk dengan pendidikan SMP, SMA dan SMK lebih besar daripada penduduk dengan tingkat pendidikan di atasnya. Ini menunjukkan bahwa lulusan SMK belum/tidak terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus tersebut menyerap tenaga kerja yang pendidikannya lebih tinggi dan lebih berkualitas dibandingkan tingkat SMK.

Angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi (Universitas) cenderung meningkat di tahun 2015, yaitu dari 6,69 persen di tahun 2014 menjadi 10,59 di tahun 2015. Secara umum TPT penduduk meningkat di jenjang pendidikan tidak memiliki ijazah SD, SMA dan Perguruan Tinggi. Penduduk dengan pendidikan menengah (SMP, SMA, SMK) menjadi kelompok penganggur terbanyak.

Tabel 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2014-2015

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Tidak memiliki ijazah SD	5,20	9,90
SD	4,90	4,09
SMP	6,10	3,92
SMA	14,26	13,06
SMK	18,60	12,68
Perguruan Tinggi	6,73	8,60
Jumlah	7,90	7,82

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

V. TARAF DAN POLA KONSUMSI



Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 908.015,- (2015) menjadi Rp 987.356,- (2016)



Pengeluaran bukan makanan turun dari 45,82 persen (2015) menjadi 44,94 persen (2016)

Pengeluaran makanan naik Dari 54,18 persen (2015) menjadi 55,06 persen (2016)





5 TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

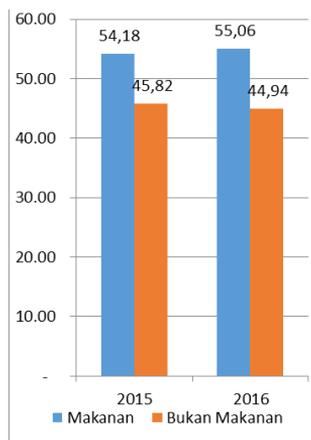
Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	492 005	543 683	54,18	55,06
Bukan Makanan	416 010	443 673	45,82	44,94
Kabupaten Rokan Hulu	908 015	987 356	100,00	100,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2015 dan 2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2015-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 908.015,- menjadi Rp 987.356,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 54,18 persen pada tahun 2015 menjadi 55,06 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan menurun dari 45,82 persen menjadi 44,94 persen.

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016



Sementara itu, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen dibanding dengan tahun 2015, yaitu dari Rp 492.005,- menjadi Rp 543.683,- per kapita sebulan. Sedangkan untuk kelompok bukan makanan, di tahun 2015 sebesar 45,82 persen dan di tahun 2016 sebesar 44,94 persen. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran yang paling besar bila dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya, jumlahnya mencapai 24,21 persen di tahun 2015 dari total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan, namun menurun menjadi 23,84 persen di tahun 2016.

Tabel 5.2. Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Kelompok Barang	Rata-rata Per Kapita (persen)	
	2015	2016
A. MAKANAN		
1. Padi-padian	9,24	9,49
2. Umbi-umbian	0,75	0,61
3. Ikan	5,28	4,95
4. Daging	2,55	2,39
5. Telur dan Susu	3,11	3,14
6. Sayur-sayuran	4,59	6,20
7. Kacang-kacangan	0,88	0,87
8. Buah-buahan	2,01	1,96
9. Minyak dan Lemak	2,59	2,31
10. Bahan Minuman	1,88	1,81
11. Bumbu-bumbuan	1,27	1,12
12. Konsumsi Lainnya	0,79	0,74
13. Makanan dan Minuman Jadi	10,59	10,99
14. Tembakau dan Sirih	8,65	8,48
Jumlah Makanan	54,18	55,06
B. BUKAN MAKANAN		
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	24,21	23,84
2. Aneka Barang dan Jasa	11,94	10,31
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,82	4,74
4. Barang yang Tahan Lama	3,53	3,45
5. Pajak dan Premi Asuransi	1,49	1,86
6. Keperluan Pesta dan Upacara	0,83	0,74
Jumlah Bukan Makanan	45,82	44,94
Jumlah Total	100,00	100,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat distribusi penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita per bulan, terlihat bahwa di Kabupaten Rokan Hulu golongan pengeluaran terbesar berada pada kelompok di atas Rp1.000.000,- yaitu sebesar 31,32 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang paling sedikit persentasenya adalah kelompok dengan pengeluaran kurang dari Rp500.000,- dengan persentase 17,23 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, angka pengeluaran per kapita Kabupaten Rokan Hulu untuk golongan pengeluaran per kapita diatas Rp1.000.000,- mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,02 persen. Jika besaran pengeluaran dianggap sebagai proxy dari besaran pendapatan yang diterima, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Namun hal ini belum tentu terjadi jika dikaitkan dengan terjadinya kenaikan proporsi pengeluaran makanan.

Tabel 5.3. Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
0 - 499 999	16,30	17,23
500 000 - 749 999	35,23	26,79
750 000 - 999 999	21,17	24,66
>1 000 000	27,30	31,32

[Diolah dari Hasil Susenas]

VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Tahun 2016 ,
rumah
berlantakan
bukan tanah
sebesar 98,72
persen



2016, rumah
tangga yang
menempati
rumah dengan
luas lantai
tempat tinggal
50-99 m²
52,25 persen

Rumah Tangga
di Kab. Rokan
Hulu yang
menggunakan
air kemasan, air
isi ulang, dan air
ledeng sebagai
sumber air
minum encapai
27,69 persen





6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal.

Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratap beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2016, secara umum persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2016, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 98,73 persen atau sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 97,77 persen.

Sementara itu, jika dilihat menurut jenis atap terluas, baik pada tahun 2015 maupun 2016, kualitas rumah yang beratap layak telah mencapai 100,00 persen. Selanjutnya, kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok dan kayu pada tahun 2016 mencapai 98,81 persen sedangkan di tahun 2015 sebesar 99,22 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	97,77	98,73
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	100,00	100,00
Dinding terluas, tembok dan kayu (%)	99,22	98,81

[Diolah dari Hasil Susenas]

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan

Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.

Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001). Pada tahun 2016 luas tempat tinggal cenderung didominasi pada kelompok luas 50-99 m² sebanyak 52,26 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 48,57 persen.

Terdapat penurunan pada persentase rumah tangga yang menempati luas tempat tinggal pada kelompok luas dibawah 20 m² dari 1,66 persen pada tahun 2015 menjadi 1,52 persen pada tahun 2016. Namun sebaliknya, terjadi peningkatan pada kelompok luas tempat tinggal 20-49 m², dari 32,42 persen pada tahun 2015 menjadi 33,56 persen pada tahun 2016.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m²) di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Luas Lantai	2015	2016
<=19	1,66	1,52
20-49	32,42	33,56
50-99	48,57	52,26
100-149	12,41	7,93
>=150	4,94	4,73
Jumlah	100,00	100,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal . Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2016, rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak mencapai 27,69 persen. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak/bersih pada tahun 2016 telah mencapai 60,94 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Selama tahun 2015-2016 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 78,55 persen

menjadi 84,08 persen. Kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Disamping telah tempat pembuangan akhir tinja juga mempengaruhi factor kesehatan masyarakat. Adanya Tanki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah mencapai 62,77 persen atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34,71 persen.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Sumber Minum Utama Air kemasan, air isi ulang & ledeng	33,10	27,69
Air minum Layak/Bersih ¹⁾	66,34	60,94
Jamban sendiri	78,55	84,08
Tempat Pembuangan Akhir Tinja berupa Tanki/SPAL	34,71	62,77
Sumber penerangan Listrik	96,83	97,84

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan: ¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016, di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 97,84 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 (96,83 persen).

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 79,30 persen, sisanya 20,70 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 4,31 persen kontrak/sewa, bebas sewa 9,07 persen dan rumah dinas/lainnya 7,32 persen.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2015 - 2016

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	77,81	79,30
Kontrak/sewa	6,22	4,31
Bebas Sewa	7,95	9,07
Rumah Dinas/Lainnya	8,02	7,32

[Diolah dari Hasil Susenas]

ISTILAH TEKNIS

Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.

Angka Beban Ketergantungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pekerja Tidak Dibayar

seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Air Minum Layak

Air minum yang terdiri dari air leding, air hujan dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat \geq 10 m]

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran Terbuka adalah :

- a. yang mencari pekerjaan
- b. yang mempersiapkan usaha
- c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ISBN 978-602-5462-20-7



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Kelompok Tani No. 7, Pasir Pengaraian 28557

Telp. : (0762) 7392150, Fax. (0762) 7392150

Homepage: <https://rohulkab.bps.go.id>, Email: bps1407@bps.go.id